

## Moratorium Hutan Belum Efektif

Moratorium izin baru eksploitasi hutan alam primer dan lahan gambut yang diberlakukan sejak 2011 belum efektif. Selain memicu konflik sosial dengan masyarakat lokal, moratorium tak mencegah perusakan hutan secara menyeluruh.

"Sejak awal, kami menduga moratorium itu tak efektif. Dulu kami ingin moratorium konversi hutan, tetapi yang dilakukan malah moratorium izin," kata Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Tengah Arie Rompas dalam diskusi tentang moratorium hutan, Rabu (25/6), di Jakarta.

Moratorium hutan diberlakukan sejak Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2011 terbit, lalu diperpanjang melalui Inpres No 6/2013. Inpres berisi penundaan pemberian izin baru serta penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut.

Inpres moratorium itu tak menghentikan deforestasi, baik di dalam maupun di luar kawasan yang telah ditetapkan. Sebelum moratorium, sebagian luasan hutan alam dan gambut dilepaskan untuk tambang, perkebunan, atau hak pengusahaan hutan (HPH). Dari sekitar 5,9 juta hektar (ha) luas moratorium hutan di Kalteng, seluas 1,7 juta ha sudah dikeluarkan izinnya sebelum inpres moratorium. Lahan 249.000 ha diizinkan untuk pertambangan, untuk perkebunan 1 juta ha, dan HPH 504.000 ha.

"Tahun 2012, Walhi memonitor 12 izin di wilayah moratorium Kalteng," kata Arie. Moratorium itu juga mempercepat pembabatan hutan di luar obyek moratorium, di mana konsentrasi perizinan ada di luar wilayah moratorium. Luasan hutan yang dimoratorium di Kalteng menyusut dari 5,7 juta ha pada Juni 2011 menjadi 3,7 juta ha pada November 2013 sesuai surat keputusan Menteri Kehutanan.

Direktur Eksekutif Walhi Jambi Musri Nauli menyatakan, penerapan moratorium hutan di Jambi memicu maraknya konflik sosial. Sebab, banyak area yang dimoratorium adalah kawasan hutan adat ataupun dikelola warga. "Kawasan yang dimoratorium seharusnya diverifikasi dengan cermat dan merupakan lahan-lahan kritis bekas HPH," ujarnya.

Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Kementerian Kehutanan Yuyu Rahayu mengakui, penerapan inpres moratorium hutan belum optimal. "Persoalan hutan itu holistik, tak bisa diselesaikan secara sektoral," kata dia. (AIK)